



EDISI KAMIS 16 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Prabowo Beri BGN Waktu Sebulan Benahi MBG

05

NUSANTARA
Tiba-tiba Purbaya Sebut BI Beri Kode Pihaknya Tak Boleh Beri Bantuan

10

LISTSTYLE
Cosmeticorexia: Saat Bahan Aktif Dewasa Rusak Kulit Anak

DUALISME STATUS FEBRIE

Sudah Tersangka Polisi, Kejaksaan Kini Jadikan Saksi



“

Bukan, kan itu kalau penyerahan berkas yang ditangani dari penyidik. Yang ini kan bukan ini, ke kita ini penyidikannya diserahkan. Beda kalau bukan ke penuntut umum, ini dari penyidik ke penyidik cuma beralih.”

ANANG SUPRIATNA
Kapuspenkum Kejagung RI

Agus Salim

Inspektur Keuangan II Agus Salim pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas)

Muhibuddin

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kajati Sumut)

Chatarina Muliana Girsang

Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan

Irene Putri

Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

Sumber :
Berbagai Sumber
diolah

Dualisme status hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dengan mencantumkan namanya sebagai saksi. Padahal, sebelumnya Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang. Hingga Rabu (15/7/2026), Febrie belum menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Padahal, dalam proses penyidikan Polri, pendalaman sejumlah barang bukti, mulai dari uang dolar Amerika Serikat (US dollar), dolar Singapura, rupiah, hingga emas batangan melibatkan pihak luar. Pemeriksaan keaslian dan asal-usul aset tersebut dilakukan FBI dan Kedutaan Amerika Serikat untuk verifikasi US dollar, Kedutaan Singapura untuk pemeriksaan Singapore dollar, serta Bank Indonesia terkait mata uang rupiah. Perbedaan status hukum Febrie itu pun menjadi perhatian publik dan disorot media internasional. Mau dibawa kemana perkara ini? BACA HAL 11...



“

Kalau kita mau konsisten dan konsekuen menegakkan hukum pidana, maka penanganan perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi harus dilaksanakan sesuai KUHAP.”

JOHANIS TANAK
Wakil Ketua KPK

**9 Penyidik
yang Menangani
Kasus Febrie**

Jamwas Riyono

Inspektur Keuangan I

Agus Sahat

Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum)

Rinaldi Umar

Wakil Kepala Kejati Banten

Zet Tadung Allo

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil)

Hari Wibowo

Direktur A pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum)



PRABOWO BERI BGN WAKTU SEBULAN BENAHİ MBG

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings resmi mempertahankan peringkat kredit sovereign Republik Indonesia pada level 'BBB' untuk jangka panjang dan 'A-2' untuk jangka pendek, dengan prospek (outlook) yang tetap berada di kategori stabil.

Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)



Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan

setelah pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi program, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga ketidaksiapan infrastruktur pendukung.

Menteri Koordinator Bidang

Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan menggunakan waktu satu bulan untuk menyelesaikan berbagai hambatan sekaligus merumuskan langkah perbaikan sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden.

"Mengenai MBG, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan dan merapkannya," ujar Zulkifli Hasan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7).

Menurut Zulhas, evaluasi dilakukan karena masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Selain dugaan penyalahgunaan, pemerintah juga mencatat banyak titik penerima manfaat yang telah ditetapkan, namun belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia makanan.

"Banyak masalahnya, ada yang terkait penyalahgunaan, kemudian masalah titik-titik yang sudah layak menerima. Bahkan sudah banyak titik yang ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya," katanya.

Selama masa evaluasi, kementerian terkait bersama BGN akan melakukan kajian menyeluruh terhadap tata kelola program. Hasil kajian tersebut nantinya disampaikan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan.

Di saat yang sama, pemerintah juga membuka peluang perubahan skema pelaksanaan MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan Presiden meminta seluruh alternatif pelaksanaan dikaji secara komprehensif, termasuk kemungkinan memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari penyaluran program.

"Pak Presiden mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh," ujar Agustina.

Ia menjelaskan, hingga kini pelaksanaan MBG masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 yang menetapkan SPPG sebagai pelaksana utama. Namun, Presiden meminta seluruh opsi dievaluasi apabila terdapat mekanisme yang dinilai lebih efektif dan mampu mempercepat layanan kepada penerima manfaat.

Agustina membenarkan bahwa penggunaan kantin sekolah menjadi salah satu alternatif yang tengah dibahas. Meski demikian, keputusan akhir baru akan diambil setelah hasil kajian disampaikan kepada Presiden dalam waktu satu bulan. (wid,ist/dya)

DPD Desak Dapur di Wilayah 3T Beroperasi Sebelum 17 Agustus

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bergerak cepat menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Target ambisius pun dipatok: seluruh dapur komunal MBG di wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil harus sudah beroperasi penuh sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.

Langkah akselerasi ini dinilai krusial agar keadilan sosial dan pemerataan gizi yang menjadi pilar utama visi Asta Cita Presiden dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan sejak hari pertama program digulirkan.

Tuntutan penuntasan pembangunan ini disuarakan secara lantang oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Ia menegaskan bahwa esensi dari kesuksesan program MBG tidak boleh hanya diukur dari megahnya realisasi di perkotaan atau wilayah pulau Jawa, melainkan dari seberapa mampu negara menjangkau wilayah-wilayah

yang secara geografis sulit diakses.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan utama adalah Pulau Kalukalukuang, sebuah pulau terluar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, di mana masyarakatnya hingga kini masih menantikan operasionalisasi program layanan gizi tersebut.

"Daerah 3T harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan justru menjadi kelompok yang paling lama menunggu. Kita ingin seluruh dapur MBG di wilayah 3T dapat segera beroperasi sebelum 17 Agustus sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Tamsil Linrung dalam keterangan resminya.

Sebagai putra asli daerah Kabupaten Pangkep, Tamsil memahami betul beratnya tantangan yang dihadapi masyarakat kepulauan untuk mendapatkan akses layanan dasar yang layak. Aspirasi dari warga

Pulau Kalukalukuang inilah yang ia bawa langsung ke meja kerja nasional dalam rapat kerja bersama Kepala BGN, Nanik S. Deyang, di Gedung Parlemen Senayan baru-baru ini.

Dalam rapat kerja Komite III DPD RI yang juga dihadiri langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin serta jajaran pimpinan BGN, disepakati komitmen bersama untuk mengurai sumbat administratif dan teknis yang selama ini memperlambat pembangunan Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di pelosok negeri.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyambut baik desakan dan dukungan penuh dari DPD RI. Ia mengakui bahwa tantangan geografis di wilayah 3T membutuhkan pendekatan yang berbeda dan kerja sama yang solid dengan perwakilan daerah agar implementasinya tepat sasaran. (gus,ist/dyy)



Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Polemik Anggaran Koperasi Desa Merah Putih ISU KIPAS ANGIN **RP1,8 TRILIUN** PICU KRITIK KERAS DPR

Program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini tengah berada di bawah sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (15/7/2026), mencuat isu anggaran bernilai fantastis yang memicu perdebatan hangat, yakni dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan total nilai mencapai Rp1,8 triliun.

Isu belanja jumbo yang awalnya bergulir tanpa dokumen resmi di media sosial ini langsung dicecar oleh anggota dewan, mengingat besarnya potensi pemborosan anggaran negara di tengah pelaksanaan program yang dinilai masih minim transparansi.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengungkapkan bahwa informasi mengenai pengadaan kipas angin bernilai triliunan rupiah tersebut telah menjadi perhatian serius masyarakat luas. Namun, pihak legislatif mengaku sama sekali tidak mendapatkan laporan resmi dari pemerintah.

Mufti memaparkan analisis hitungan kalkulasi harga pasar untuk menunjukkan adanya kejanggalan dalam angka anggaran tersebut.

"Kami mencari informasi, tapi tidak mendapatkan satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Waduh, Koperasi Merah Putih membeli kipas angin hingga satu triliun delapan ratus juta rupiah? Itu kipasnya beli berapa? Coba di-track-nya itu," ujar Mufti Anam



dengan nada heran.

Berdasarkan pengecekan di berbagai platform e-commerce, Mufti menyebutkan harga satuan kipas angin standar hanya berkisar antara Rp300.000 hingga Rp338.000. Jika mengacu pada harga riil pasar tersebut, anggaran total untuk 1,8 juta unit seharusnya bisa ditekan jauh lebih efisien dan tidak akan menyentuh angka Rp1,8 triliun.

Tidak hanya masalah kipas angin,

Mufti Anam juga membeberkan ketimpangan data terkait biaya pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putih. Menurut informasi yang diterimanya, pagu anggaran pembangunan per gerai dialokasikan sebesar Rp1,6 miliar, namun dana yang benar-benar tersalurkan kepada pelaksana di tingkat desa dilaporkan hanya sekitar Rp700 juta.

"Sisanya uangnya ke mana? Kami juga pengen tanya, duitnya dari mana?"

JULI 2026, KONDISI RIIL PROGRAM KDMP MENUNJUKKAN POTRET SEBAGAI BERIKUT:

- **Total Unit Koperasi Terdaftar:** 83.380 unit tersebar di seluruh Indonesia.
- **Gerai Fisik yang Selesai Dibangun:** Baru mencapai 16.306 unit. Ini berarti baru sekitar 19,5% gerai fisik yang rampung dari total
- **Target unit terdaftar,** mencerminkan adanya perlambatan pembangunan infrastruktur di tingkat desa.
- **Aktivitas Transaksi:** Tercatat sebanyak 54.134 kali transaksi sejak awal tahun 2026.
- **Volume Perputaran Uang:** Total nilai transaksi komersial yang berhasil dibukukan mencapai Rp56,77 miliar



cecar Mufti, mendesak pemerintah membuka aliran dana program secara gamblang agar dapat diawasi secara ketat.

Anggaran Kemenkop Tembus Rp1,2 Triliun, Mayoritas untuk KDMP

KEMENTERIAN Koperasi mencatat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1 triliun, dengan sebagian besar alokasi diarahkan untuk mendukung program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI menjelaskan, pagu awal anggaran Kementerian Koperasi tahun 2025 sebesar Rp473,31 miliar. Setelah mengalami efisiensi sebesar Rp155,83 miliar, anggaran efektif sempat berada di kisaran Rp317 miliar.

Namun, pemerintah kemudian memberikan tambahan anggaran belanja sebesar Rp744,44 miliar. Dari tambahan tersebut, sekitar 87,67 persen atau Rp652,69 miliar dialokasikan untuk dana dekonsentrasi guna mendukung pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan tambahan tersebut, total

anggaran Kementerian Koperasi tahun 2025 meningkat menjadi sekitar Rp1,217 triliun atau naik 157,26 persen dibanding pagu awal.

"Dengan demikian, total anggaran Kementerian Koperasi tahun 2025 meningkat menjadi Rp1,217 triliun untuk pelaksanaan program prioritas koperasi desa Kelurahan Merah Putih," ujar Ferry.

Dari sisi belanja, peningkatan terbesar terjadi pada belanja barang yang mencapai Rp1,12 triliun atau naik sekitar 184 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk mempercepat berbagai program prioritas, termasuk pengembangan KDKMP.

Sementara itu, belanja modal meningkat menjadi Rp17,32 miliar dan belanja pegawai menjadi Rp79,50 miliar.

Hingga akhir 2025, realisasi anggaran Kementerian Koperasi tercatat mencapai Rp1,006 triliun atau 87,25 persen dari pagu efektif

sekitar Rp1,15 triliun.

Meski demikian, Ferry mengakui masih terdapat tantangan dalam penyerapan anggaran, terutama terkait penggunaan dana dekonsentrasi yang tersebar di seluruh provinsi. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan pengurus KDKMP serta penyediaan tenaga pendamping.

Menurut Ferry, luasnya wilayah Indonesia serta jumlah koperasi desa yang harus didampingi menjadi tantangan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Selain penyerapan anggaran, Kementerian Koperasi juga melaporkan sejumlah capaian strategis sepanjang 2025. Sebanyak 69 koperasi telah masuk dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pemasok bahan baku. (wid,ist/day)

Menkop: Pengadaannya Bukan di Kami

Menanggapi rentetan pertanyaan kritis dari anggota Komisi VI DPR, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengaku terkejut dan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail rincian belanja perlengkapan tersebut.

"Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Pengadaannya bukan di kami," jawab Ferry Juliantono secara singkat saat memberikan klarifikasi di depan ruang rapat komisi.

Pengakuan Menkop ini langsung menuai kritik balik dari pihak parlemen. DPR menyayangkan kurangnya koordinasi lintas sektor, mengingat Kementerian Koperasi merupakan institusi utama yang menaungi implementasi program KDMP.

Terlebih lagi, berdasarkan laporan di lapangan, para kepala desa selaku pengguna (user) fasilitas koperasi pun dikabarkan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan pemenuhan kebutuhan barang-barang tersebut. (wid,ist/day)

Kematian Tragis Dokter PPDS Unri di Siak dr. ALEX KRISTO ALAMI MEMAR DAN TEMUAN SUNTIKAN di TKP

Dunia kedokteran dan pendidikan spesialis di Indonesia kembali berduka sekaligus diguncang kabar kelam. Seorang dokter residen yang tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Riau (Unri), dr. Alex Cristo Loris (30), ditemukan tewas mengenaskan di area semak belukar di samping pagar luar RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau, pada Selasa (14/7/2026) siang sekitar pukul 11.30 WIB.



Alex Kristo Lotis (30) dokter residen yang sedang menjalani pendidikan spesialis di RSUD Tengku Rafian Siak ditemukan tewas di samping pagar rumah sakit, Selasa (14/7/2026). Foto: Dok. Istimewa

Hingga saat ini, aparat kepolisian dibantu tim forensik masih terus mendalami penyebab pasti kematian dokter muda tersebut guna menentukan apakah ada unsur tindak pidana dalam kasus ini.

Misteri kematian dr. Alex bermula ketika dirinya dilaporkan hilang sejak Senin (13/7/2026) sore sekitar pukul 18.00 WIB. Istri korban, dr. YM (31), yang juga bertugas dan tinggal di asrama RSUD Tengku Rafian, sempat berulang kali mencoba menghubungi telepon genggam suaminya sekitar pukul 17.30 WIB, namun nomor tersebut mendadak tidak aktif dan berada di luar jangkauan.

Khawatir karena korban tak kunjung kembali dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis maupun masalah keluarga, pihak keamanan rumah sakit melakukan penelusuran melalui rekaman kamera pengawas (CCTV).

Berdasarkan rekaman CCTV di area radiologi, dr. Alex terlihat berjalan seorang diri meninggalkan kawasan rumah sakit pada Senin sore pukul 18.06 WIB, melewati Pos Security II menuju ke arah Jalan Raja Kecil. Setelah momen itu, keberadaannya tidak lagi diketahui.

Pencarian intensif berakhir tragis keesokan harinya, Selasa

(14/7/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Petugas keamanan menemukan dr. Alex dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di semak belukar, hanya berjarak sekitar lima meter dari pagar pembatas luar rumah sakit. Suasana duka langsung pecah di lokasi kejadian ketika sang istri tak kuasa menahan kesedihan dan menangis histeris di samping jasad suaminya.

Di tempat kejadian perkara (TKP), polisi mengamankan sejumlah barang pribadi korban yang masih utuh, termasuk dompet, kartu identitas, dan telepon genggam. Namun, yang menjadi perhatian khusus adalah ditemukannya tas medis milik korban yang berisi alat suntik serta sediaan ampul obat di dekat jasadnya.

Kekerasan Benda Tumpul

Polda Riau segera melakukan autopsi jasad korban di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk menguak tabir kematian dr. Alex. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Riau, AKBP Rudi A Samosir, membeberkan hasil pemeriksaan sementara tim dokter forensik.

"Terdapat luka memar pada kepala korban yang diidentifikasi akibat kekerasan benda tumpul," katanya.

Ditemukan juga luka berbentuk titik disertai pembengkakan pada

punggung tangan kiri korban. Tim forensik juga mendeteksi adanya luka di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua lengan. Namun, luka-luka ini dipastikan terjadi setelah korban meninggal dunia akibat gigitan serangga selama jasadnya berada di semak-semak.

Ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah dan pembendungan (kongesti) pada sejumlah organ dalam korban.

Meski terdapat beberapa luka fisik, tim dokter forensik belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian dr. Alex. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan histopatologi forensik dan toksikologi terhadap sampel urine, darah, serta organ dalam korban guna mendeteksi keberadaan zat asing atau kandungan obat di dalam tubuhnya.



PERISTIWA FATAL YANG MENIMPA DOKTER PPDS

○ Agustus 2024 – dr. Aulia Risma Lestari (PPDS Anestesi Undip): Meninggal dunia, diduga akibat tekanan berat, perundungan, dan pemerasan. Kasus ini memicu reformasi serta pembekuan sementara program PPDS Anestesi Undip.

○ April 2024 – Data Kemenkes RI: Dari 12.121 dokter PPDS, 22,4% (2.715 orang) mengalami depresi sedang-berat, dan sekitar 3% mengaku memiliki pikiran menyakiti diri atau bunuh diri.

○ 2023 – dr. Albertus (PPDS Bedah): Meninggal akibat serangan jantung setelah diduga mengalami kelelahan ekstrem karena menjalani jaga hampir 36 jam tanpa jeda.

Intervensi Kementerian Kesehatan

Mengingat status korban sebagai dokter residen, kasus ini langsung memicu perhatian nasional. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI secara resmi menyatakan turun tangan untuk mengawal ketat jalannya penyelidikan kasus ini. Langkah ini diambil guna memastikan penyelidikan berjalan transparan dan objektif, sekaligus untuk meneliti lebih dalam mengenai latar belakang kondisi kerja psikis maupun fisik dr. Alex selama menjalani residensi.

"Kami terus memonitor dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan info lebih detil dan jelas khususnya dari pihak RSUD Rafian Siak dan Universitas Riau," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, saat dikonfirmasi.

Fakta baru yang terungkap dari penyelidikan internal menunjukkan bahwa dr. Alex ternyata baru bertugas sekitar satu hingga dua pekan di RSUD Tengku Rafian Siak. Dokter asal Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku ini baru saja ditempatkan di Siak pada awal Juli 2026 untuk menjalani stase klinis pendidikan spesialisnya. Fakta bahwa ia baru saja memulai masa tugasnya namun berakhir tragis dalam waktu singkat memicu tanda tanya besar di kalangan kolega dan pengamat kesehatan. (wid,ist/kum)

TIBA-TIBA PURBAYA SEBUT BI BERI KODE PIHAKNYA **TAK BOLEH BERI BANTUAN**

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba buka-bukaan mengenai alasan di balik keputusan pemerintah yang sempat menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di perbankan nasional. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (15/7/2026), Purbaya mengungkapkan adanya 'kode' dari Bank Indonesia (BI) yang meminta agar Bendahara Negara tidak ikut campur dalam kebijakan moneter.



Petugas menunjukkan uang pecahan dolar Amerika Serikat (AS) dan rupiah di Dolar Asia Money Changer, Jakarta, Rabu (8/7/2026). (ist.cnbc)

Keputusan menarik dana SAL dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersebut diakui sebagai langkah sinkronisasi dan koordinasi agar kebijakan fiskal pemerintah tidak mengganggu kebijakan otoritas moneter.

"Saya bukan mau ngambil uang tiba-tiba. Saya maunya nambah sebanyak-banyaknya, tetapi kan saya bukan bank sentral. Ketika bank sentral memberi kode ke saya jangan ikut campur kebijakan moneter, ya saya ikut. Mereka bilang kurang uang kamu, kami akan ganti," ungkap Purbaya di hadapan Komisi XI DPR RI.

Purbaya menekankan bahwa langkah ini sengaja diambil demi menghormati wewenang lembaga lain. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah bersikap tidak konsisten atau mengambil keputusan secara sembrono tanpa perhitungan yang matang. Setiap kebijakan yang ditempuh selalu melalui koordinasi ketat dengan berbagai lembaga terkait, termasuk otoritas moneter dan DPR.

"Jadi saya nggak pernah sembrono dalam hal itu, apalagi menyangkut nasib negara. Saya ngerti betul kalau saya ambil pasti runtuh, tetapi kita nggak mau ikut campur kebijakan lembaga yang lain. Waktu itu mereka bilang mereka akan ganti uangnya, ya sudah saya tarik kalau gitu," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, ia menambahkan

koordinasi lintas lembaga ini juga melibatkan peran pengawasan parlemen.

"Jadi bukan saya main-main atau maju mundur enggak ada perhitungan. Tapi untuk mensinkronisasi kebijakan dengan lembaga lain, termasuk dengan DPR. Waktu itu keputusannya diambil di DPR, saya ikut. Tapi setelah ada koreksi, saya ikut juga. Jadi ke depan kita lebih hati-hati manage uang itu," beber Purbaya.

Sebagai catatan, pada pekan pertama Juni, tepatnya Sabtu (6/6/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memang sempat mengumpulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo secara mendadak untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi.

Pada saat itu, Dasco menyatakan, "Pagi hari ini kami DPR sengaja berkumpul dengan teman-teman otoritas moneter maupun fiskal dan pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik."

Masalah Indikator Likuiditas

Meski BI meyakinkan bahwa likuiditas yang ditarik akan digantikan oleh instrumen moneter mereka, kenyataan di lapangan berkata lain.

Setelah dana ditarik, pihak bank Himbara justru ramai-ramai mendatangi Kemenkeu dan mengeluhkan terjadinya kekeringan likuiditas. Alhasil, pemerintah harus segera melakukan re-inject (suntikan kembali) dana ke sistem perbankan.

"Walaupun di indikator bank sentral ample, kenyataannya nggak ada. Waktu kemarin bank-bank komplain itu, saya tanyakan mereka gimana? Uangnya memang nggak ada katanya, loh indikatornya kan bagus semua. Berarti indikator yang mereka pakai, yang kita pakai selama ini nggak akurat. Kita menyadari itu dan kita akan perbaiki ke depan," papar Purbaya.

Untuk menjaga stabilitas ke depan, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengonfirmasi bahwa total dana SAL pemerintah yang ditempatkan di perbankan kini ditingkatkan hingga berkisar antara Rp381 triliun hingga Rp400 triliun. Dana ini dipastikan akan tetap disimpan di sistem perbankan hingga Desember 2026 demi mendorong penyaluran kredit yang saat ini tengah tinggi.

"Dari Rp281 triliun kan awalnya, Rp110 triliun ditarik bulan ini, dikembalikan lagi Rp110 triliun jadi tetap Rp281 triliun. Itu dijaga sampai Desember 2026," ujar Juda Agung di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pemerintah juga menyiapkan tambahan dana Rp110 triliun sebagai dana siaga (standby fund) yang siap

KRONOLOGI LENGKAP TARIK ULUR DANA SAL SEJAK SEPTEMBER 2025

September 2025 (Penempatan Awal Rp200 Triliun):

Hanya selang beberapa hari setelah dilantik sebagai Bendahara Negara, tepatnya pada Jumat (12/9/2025), Purbaya mengalirkan dana SAL sebesar Rp200 triliun dari BI ke bank-bank Himbara. Alokasinya meliputi:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: **Rp55 triliun**
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI): **Rp55 triliun**
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI): **Rp55 triliun**
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN): **Rp25 triliun**
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI): **Rp10 triliun**

10 November 2025

Tambahan Rp76 triliun disalurkan ke Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BPD DKI.

Desember 2025

Di penghujung tahun, Kemenkeu menarik kembali dana sebesar **Rp75 triliun** dari perbankan guna mendanai keperluan belanja pemerintah akhir tahun.

Maret 2026

Pemerintah menyuntikkan tambahan dana **Rp100 triliun ke perbankan**. Langkah strategis ini diambil demi meredam lonjakan imbal hasil (yield) surat utang imbas dari memanasnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Juni 2026

Pada bulan Juni, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar **Rp110 triliun** dari total dana awal Rp281 triliun. Namun, menyusul keluhan likuiditas dari perbankan, dana Rp110 triliun tersebut segera dikembalikan ke sistem perbankan.

ditempatkan kapan saja di Himbara.

Secara umum, skema pengelolaan dana sekitar Rp400 triliun ini dibagi ke dalam tiga tenor yang dinamis. Pertama, Rp200 triliun ditempatkan dengan jangka panjang hingga akhir tahun 2026. Kemudian, Rp100 triliun ditempatkan dalam jangka waktu pendek selama tiga bulan.

Tetakhir, Rp100 triliun ditempatkan sebagai dana fleksibel (bisa keluar masuk sewaktu-waktu) guna memastikan likuiditas harian di sistem perbankan selalu berada pada level yang aman. (wid,ist/dya)

DPRD Kota Malang Soroti Jabatan Strategis Diisi Plt Lebih dari Setahun



Anggota Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyu. (Santi/Lentera)

MALANG - DPRD Kota Malang kembali mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk segera mengisi jabatan strategis yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt). Pasalnya, kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang telah berlangsung lebih dari satu tahun itu dinilai menghambat efektivitas kinerja birokrasi.

"Kami ataupun saya pribadi juga sudah berulang kali mengingatkan kepada Wali Kota Malang. Sudah setahun lebih sejumlah jabatan strategis masih kosong dan diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt)," ujar Anggota Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyu, Rabu (15/7/2026).

Dikatakannya, kondisi tersebut mulai dirasakan hingga level paling bawah pemerintahan. Sejumlah kecamatan dan kelurahan, kata Arief, mengalami kebingungan ketika harus merealisasikan berbagai program, termasuk Program RT Berkelas, karena beberapa posisi pimpinan masih berstatus Plt.

Tak hanya di wilayah, Arief menyebut persoalan serupa juga terjadi di sejumlah perangkat daerah. "Bahkan ada yang statusnya pelaksana harian

(Plh) sudah hampir setahun. Mohon ada langkah cepat," tegasnya.

Arief juga mengingatkan agar rekomendasi penerapan Manajemen Talenta yang telah dikantongi Pemkot Malang tidak justru menjadi kendala dalam proses mutasi maupun pengisian jabatan. "Ini sangat penting agar kinerja eksekutif ke depan benar-benar bisa berjalan normal," ungkapnya.

Diketahui, saat ini terdapat 8 jabatan strategis yang masih diisi Plt, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Inspektur Inspektorat, Staf Ahli Bidang Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, serta Camat Lowokwaru.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan Pemkot Malang telah memperoleh persetujuan penerapan Manajemen Talenta dari Badan

Kepegawaian Negara (BKN) pada awal Juni lalu. Setelah persetujuan diterima, pemerintah langsung melakukan pemetaan kompetensi seluruh aparatur sipil negara (ASN) melalui sistem Manajemen Talenta.

Menurut Wahyu, hasil pemetaan awal menunjukkan jumlah ASN yang memenuhi kualifikasi pada kelompok kompetensi yang dibutuhkan masih relatif sedikit.

"Saat itu kami langsung bergerak. Kami minta Plt Kepala BKPSDM menunjukkan dari seluruh ASN Kota Malang itu masuk ke box berapa. Tetapi ternyata dari box-box yang ingin saya gunakan sebagai acuan mutasi ataupun pengisian jabatan, jumlahnya sangat sedikit," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, pada setiap kelompok kompetensi atau box yang menjadi acuan pengisian jabatan, target keterisian seharusnya mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. Namun saat dilakukan pemetaan, rata-rata baru terisi sekitar 30 hingga 40 persen ASN yang sesuai dengan kualifikasi. (Santi/Dya)

Tata Pasar Turen, Pemkab Malang Usulkan Anggaran Rp6 M di 2027

MALANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengusulkan anggaran sekitar Rp6 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2027 untuk menata kawasan Pasar Turen. Rencana tersebut mencuat setelah kebakaran yang terjadi di area belakang. Selain itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi kawasan pasar secara menyeluruh.

Bupati Malang, Sanusi mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memperluas kawasan Pasar Turen, membangun hanggar dan lapak pedagang yang lebih representatif, memindahkan tempat penampungan sementara (TPS), hingga meninggikan plengsengan di sisi pasar yang dinilai rawan longsor.

"Bekas kebakaran dan timbunan sampah ini dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kami tata kembali," ujar Sanusi, dikutip pada Rabu (15/7/2026).

Sebelumnya, pada Selasa (14/7/2026) Sanusi beserta kepala perangkat daerah terkait telah melakukan peninjauan di Pasar Turen.

Dalam kesempatannya, Sanusi tidak hanya melihat lokasi bekas kebakaran, tetapi juga berkeliling ke kawasan permukiman di sisi kanan, kiri, dan belakang pasar. Langkah itu dilakukan untuk memetakan rencana penataan kawasan secara menyeluruh.

Melalui penataan tersebut, Sanusi berharap Pasar Turen menjadi lebih tertata dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Salah satu rencana yang disiapkan ialah memindahkan TPS dari bagian belakang ke sisi depan pasar agar tidak lagi terjadi penumpukan sampah di area yang berdekatan dengan sungai.

"Nantinya hanggar dan lapak bagi pedagang akan lebih bagus dibanding saat ini. Di bagian belakang ini nantinya akan menjadi hanggar dan lapak semua untuk pedagang," kata Sanusi.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat dan meninggikan plengsengan di sisi Pasar Turen sebagai langkah mitigasi terhadap potensi longsor di kawasan tersebut.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di area TPS Pasar Turen pada Senin

(13/7/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Peristiwa itu menghancurkan satu lapak pedagang dan satu bangunan mandi, cuci, kakus (MCK). Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari 2 jam dan tidak sampai merambat ke bangunan utama pasar.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sanusi juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai sumber api sebelum pihak berwajib merilis penyebab secara pasti. "Sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh menyambut baik rencana penataan Pasar Turen. Menurutnya, kondisi pasar, terutama TPS yang berada di bagian belakang dan berdekatan dengan aliran sungai, memang sudah memerlukan pembenahan.

Tantri menilai pembangunan



Bupati Malang, Sanusi meninjau area bekas kebakaran di bagian belakang Pasar Turen. (foto: Prokopim Kab. Malang)

plengsengan menjadi salah satu kebutuhan utama sebelum kawasan tersebut ditata lebih lanjut. Selain untuk memperkuat struktur tanah, langkah itu juga dinilai penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah di kawasan pasar.

"Dalam penataan nanti, di sana tahapannya harus membuat plengsengan di TPS. Harus menangani sampahnya di situ, jadi harus dibangun terasering. Bekas-bekas sisanya juga harus dipindahkan atau direlokasi terlebih dahulu," katanya. (Santi/Dya)

Langkah tersebut menjadi babak baru dalam ketegangan hubungan Ankara dan Tel Aviv yang meningkat sejak pecahnya perang Gaza. Berdasarkan laporan media Turki, Sabah, keputusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana Nomor 11 Istanbul yang menangani perkara dugaan pelanggaran terhadap aktivis kemanusiaan internasional dari kelompok Global Sumud Flotilla.

Dalam perkara tersebut, otoritas Turki menyoroti tindakan penahanan terhadap para aktivis yang disebut berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Ankara menilai tindakan tersebut perlu diselidiki karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan.

Keputusan terbaru ini memperpanjang rangkaian langkah hukum Turki terhadap sejumlah pejabat Israel. Sebelumnya, pada November 2025, Kejaksaan Agung Istanbul juga dilaporkan membuka proses hukum terhadap Netanyahu dan beberapa pejabat tinggi militer Israel terkait dugaan pelanggaran berat dalam konflik di Jalur Gaza.

Pemerintah Turki selama ini menjadi salah satu negara yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berulang kali menyerukan penyelidikan internasional terhadap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik berlangsung.

Ankara menyatakan bahwa setiap tindakan terhadap warga sipil dan organisasi kemanusiaan harus diproses melalui mekanisme hukum internasional. Pemerintah Turki juga menilai operasi militer yang berdampak terhadap masyarakat sipil tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban hukum.

Pelanggaran Aktivis Kemanusiaan

Pengadilan Istanbul menyatakan telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan keterangan saksi terkait dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap aktivis Global Sumud Flotilla. Bukti tersebut, menurut otoritas Turki, mencakup kesaksian dari pihak medis dan pemeriksaan terhadap kondisi fisik maupun psikologis para aktivis setelah proses penahanan.

Kelompok Global Sumud Flotilla merupakan jaringan aktivis internasional yang membawa misi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Gaza. Namun, upaya pengiriman bantuan tersebut mendapat hambatan setelah kapal mereka dicegat oleh otoritas Israel.

Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya mengecam tindakan pencegahan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi serta aturan hukum laut internasional.



Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu

TURKI TERBITKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN NETANYAHU

Pemerintah Turki melalui lembaga peradilanannya mengambil langkah hukum terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dugaan pelanggaran hukum internasional dalam konflik Gaza. Pengadilan Pidana Istanbul disebut menerbitkan surat perintah penahanan internasional yang diajukan melalui mekanisme kerja sama kepolisian internasional Interpol.

Pemerintah Ankara juga mendesak adanya penyelidikan independen terhadap insiden tersebut.

Langkah hukum terhadap Netanyahu berpotensi memperbesar tekanan diplomatik terhadap Israel di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi

kemanusiaan di Gaza.

Hubungan Turki dan Israel sendiri mengalami penurunan signifikan sejak perang Gaza berlangsung. Ankara mengambil posisi kritis terhadap kebijakan militer Israel, sementara pemerintah Tel Aviv menolak

berbagai tuduhan yang diarahkan kepada mereka dan menyatakan operasi militernya dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional. (wid,rls,ist/dya)

Israel Beri Peringatan Iran

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Iran agar tidak melakukan serangan terhadap negaranya. Netanyahu menegaskan, Israel akan memberikan respons militer yang jauh lebih besar apabila Teheran kembali melancarkan serangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu saat menghadiri konferensi di Dimona, Israel bagian selatan, Rabu (15/7/2026). Ia menyebut Israel tidak akan lagi membiarkan serangan terhadap negaranya tanpa balasan.

"Kepada para pemimpin Iran, jangan berharap situasi akan tetap tenang jika kalian menyerang kami," kata Netanyahu dalam pernyataannya yang dikutip dari AFP.

Netanyahu menegaskan, pola respons Israel terhadap serangan Iran ke depan akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Ia menyatakan serangan balasan yang akan dilakukan Israel berpotensi memiliki dampak yang lebih besar.

"Tidak akan ada pengulangan seperti sebelumnya. Meskipun serangan sebelumnya sudah sangat dahsyat, kali ini situasinya akan berbeda dan dampaknya akan jauh lebih besar," ujar Netanyahu.

Pernyataan Netanyahu disampaikan ketika hubungan Israel dan Iran kembali mengalami eskalasi. Dalam beberapa waktu terakhir, kedua negara terlibat dalam aksi saling serang yang melibatkan dukungan dan keterlibatan Amerika Serikat.

Netanyahu mengatakan Israel akan terus mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan negaranya.

"Kami telah melakukan ini terhadap apa yang kami sebut sebagai poros kejahatan di Iran, dan kami akan terus melakukannya kepada siapa pun yang membahayakan kami," ujarnya.

Dimana, lokasi konferensi tersebut berlangsung, merupakan wilayah yang menjadi perhatian

Dakwaan dan Tuduhan terhadap Netanyahu

Kasus Korupsi di Israel

- **Kasus 1000:** Didakwa menerima hadiah mewah dari pengusaha sebagai imbalan bantuan politik.
- **Kasus 2000:** Diduga membuat kesepakatan dengan pemilik media demi liputan positif.
- **Kasus 4000:** Didakwa memberi keuntungan regulasi kepada Bezeq sebagai imbalan pemberitaan yang menguntungkan.

Kasus di ICC

- **21 November 2024:** ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.
- **Tuduhan:** Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang serta serangan terhadap warga sipil.

internasional karena terdapat fasilitas nuklir Israel. Pemerintah Israel selama ini tidak pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir, meskipun sejumlah pihak internasional memperkirakan negara tersebut memiliki kemampuan nuklir. (wid,ist/dya)

Diet Gaya Nusantara: Racikan Herbal Pembakar Kalori

Di tengah gempuran tren pelangsing kimiawi, khalayak kini mulai melirik kembali ke meja ramuan leluhur yang menawarkan solusi penurunan berat badan secara organik, aman, dan berkelanjutan. Jamu tradisional Indonesia, yang mengandalkan kekayaan tanaman obat asli bumi Nusantara, aktif bekerja memperbaiki sistem metabolisme tubuh dari dalam. Ada sedikitnya lima jamu tradisional peramping tubuh yang telah divalidasi oleh kearifan lokal maupun riset sains modern.

**Panduan
Mengonsumsi
Jamu**

Utamakan Jamu Segar Tanpa Bahan Kimia Obat (BKO)

Konsumsi jamu gendong segar yang baru diracik atau pilih produk kemasan yang telah mengantongi izin resmi BPOM guna menghindari campuran bahan kimia sintetis yang merusak ginjal.

Batasi Penambahan Pemanis Buatan

Hindari penggunaan gula jawa atau gula pasir berlebih saat menyajikan jamu agar asupan kalori harian Anda tetap terkontrol dengan baik selama program diet.

Pahami Kondisi Lambung Anda

Minum jamu yang bersifat asam seperti kunyit asam atau teh jeruk nipis setelah makan jika Anda memiliki riwayat lambung sensitif untuk menghindari iritasi asam lambung.

Patuhi Batas Konsumsi Harian

Batasi konsumsi jamu maksimal 1 hingga 2 gelas saja per hari, karena asupan herba yang berlebihan justru dapat memperberat kerja organ hati dalam menyaring zat aktif.

Galian Singset
Ramuan galian singset merajai daftar sebagai jamu tradisional yang paling dipercaya untuk menjaga kelenturan dan kebugaran tubuh perempuan. Formula legendaris yang memadukan kunyit, kencur, temulawak, temu giring, dan lempuyang ini bekerja aktif mendorong proses detoksifikasi alami tubuh serta mengurangi timbunan lemak secara konsisten. Pakar herbal medik kerap menekankan pentingnya sinergi rimpang ini dalam menunjang metabolisme. "Sinergi bahan aktif dalam galian singset tidak hanya meluruhkan lemak, tetapi juga merangsang produksi kolagen alami sehingga kulit tetap kencang dan tidak menggelambir setelah berat badan turun."

Klabet atau Fenugreek
Bagi Anda yang sering gagal diet karena kesulitan menahan rasa lapar, klabet atau fenugreek menawarkan solusi alami untuk mengontrol nafsu makan secara efektif. Biji herbal ini bekerja aktif memperlambat pencernaan di dalam lambung, sehingga mengirimkan sinyal kenyang lebih cepat ke otak. Khasiat ini didukung penuh oleh uji klinis internasional yang dirilis oleh Department of Food Science and Nutrition, University of Minnesota, Amerika Serikat. Jocelyn R. Mathern, dkk., menemukan bukti kuat mengenai efektivitas biji ini, "Partisipan yang mengonsumsi 8 gram serat fenugreek setiap hari terbukti mengalami peningkatan rasa kenyang yang signifikan, sekaligus menunjukkan penurunan rasa lapar dan pengurangan asupan makanan secara sukarela."

Teh Jeruk Nipis
Metabolisme yang lambat merupakan musuh utama dalam program penurunan berat badan. Untuk mengatasinya, kombinasi teh hijau hangat dan perasan jeruk nipis segar hadir sebagai stimulan pembakar kalori yang sangat kuat. Teh hijau

membawa kandungan antioksidan epigallocatechin gallate (EGCG) yang tinggi, sementara jeruk nipis menyuplai asam sitrat dosis tinggi. Kolaborasi kedua bahan aktif ini mempercepat oksidasi lemak menjadi energi siap pakai. "Asam sitrat dalam jeruk nipis segar bekerja aktif meningkatkan fungsi enzim pencernaan, membantu tubuh menyerap nutrisi lebih cepat sekaligus mencegah penyerapan lemak berlebih pada dinding usus."

Ginseng
Ginseng tidak hanya berperan sebagai pemulih stamina dalam pengobatan tradisional, tetapi juga memegang andil besar dalam memangkas berat badan. Senyawa aktif ginsenosida di dalamnya aktif menstimulasi sistem saraf pusat untuk membakar energi lebih efisien. Sebuah studi ilmiah tahun 2014 yang dipublikasikan oleh Mi-Young Song, dkk., dari Department of Rehabilitation Medicine of Korean Medicine, menyingkap tabir di balik khasiat pelangsing dari t a n a m a n

ini. "Konsumsi ginseng Korea secara rutin dua kali sehari selama delapan minggu terbukti tidak hanya efektif menurunkan berat badan secara signifikan, tetapi juga berhasil mereformasi komposisi mikrobiota usus ke arah yang lebih sehat."

Kunyit Asam
Jamu kunyit asam menjadi salah satu minuman tradisional paling populer karena kesegaran rasanya dan khasiatnya yang melimpah. Racikan sederhana yang memadukan asam jawa, kunyit segar, gula jawa, dan sejumput garam ini menyimpan kekuatan antioksidan yang sangat tinggi. Kandungan kurkumin dalam kunyit bekerja aktif di tingkat seluler untuk menekan obesitas. "Kurkumin secara aktif menghambat proses angiogenesis yaitu pembentukan pembuluh darah baru pada jaringan adiposa. Tanpa suplai darah yang cukup, sel-sel lemak baru tidak akan mampu berkembang biak di dalam tubuh." (far,ist/dya)



Ilmuwan Singapura-Jepang Ciptakan Keco Cyborg, Mampu Menyelam 3 Jam

Di dunia robotika dan mitigasi bencana, selama dekade terakhir, para insinyur di berbagai belahan dunia berlomba-lomba menciptakan robot berukuran mikro (micro-robots) untuk menembus celah sempit reruntuhan gedung. Namun, proyek-proyek tersebut berulang kali membentur masalah sama yaitu keterbatasan daya baterai.

Robot mikro buatan terbukti sangat boros energi, baterai berkapasitas besar membuat bobotnya terlalu berat, sementara baterai kecil membuatnya mati dalam hitungan menit.

Menghadapi jalan buntu tersebut, sekelompok ilmuwan lintas negara mengambil langkah tak biasa, alih-alih menciptakan mesin dari nol, mengapa tidak membajak mekanika tubuh yang sudah disediakan oleh alam.

Pilihan itu jatuh pada salah satu makhluk paling tangguh di bumi yaitu

kecoa. Melalui sentuhan sibernetika, lahirlah apa yang disebut sebagai kecoa cyborg--serangga hidup yang dipasang perangkat pengendali elektronik pada sistem sarafnya untuk mengarahkan pergerakan secara nirkabel dari jarak jauh.

Langkah ini bukan lagi sekadar eksperimen laboratorium yang eksentrik. Laporan dari berbagai media arus utama mencatat bahwa teknologi cyborg ini dipersiapkan untuk dikerahkan ke zona merah pascabencana untuk menjangkau labirin reruntuhan yang mustahil diakses oleh tim Search and Rescue (SAR) manusia maupun anjing pelacak. Di tengah ancaman bencana global. Misalnya seperti gempa tektonik dahsyat bermagnet

udo 7,7 yang baru-baru ini melanda Venezuela. Kebutuhan akan armada penyelamat mikro yang adaptif dan tangguh di segala medan menjadi semakin mendesak.

Namun, misi penyelamatan pascabencana sering kali menyuguhkan skenario yang jauh lebih kompleks daripada sekadar tumpukan beton kering. Gempa bumi maupun cuaca ekstrem kerap diikuti oleh banjir bandang, kebocoran pipa bawah tanah, atau genangan air yang mengisolasi korban di ruang bawah tanah (basement). Di sinilah kelemahan awal kecoa cyborg muncul. Sebagai makhluk terestrial, mereka akan

tenggelam dan mati jika terjebak di dalam air dalam durasi lama.

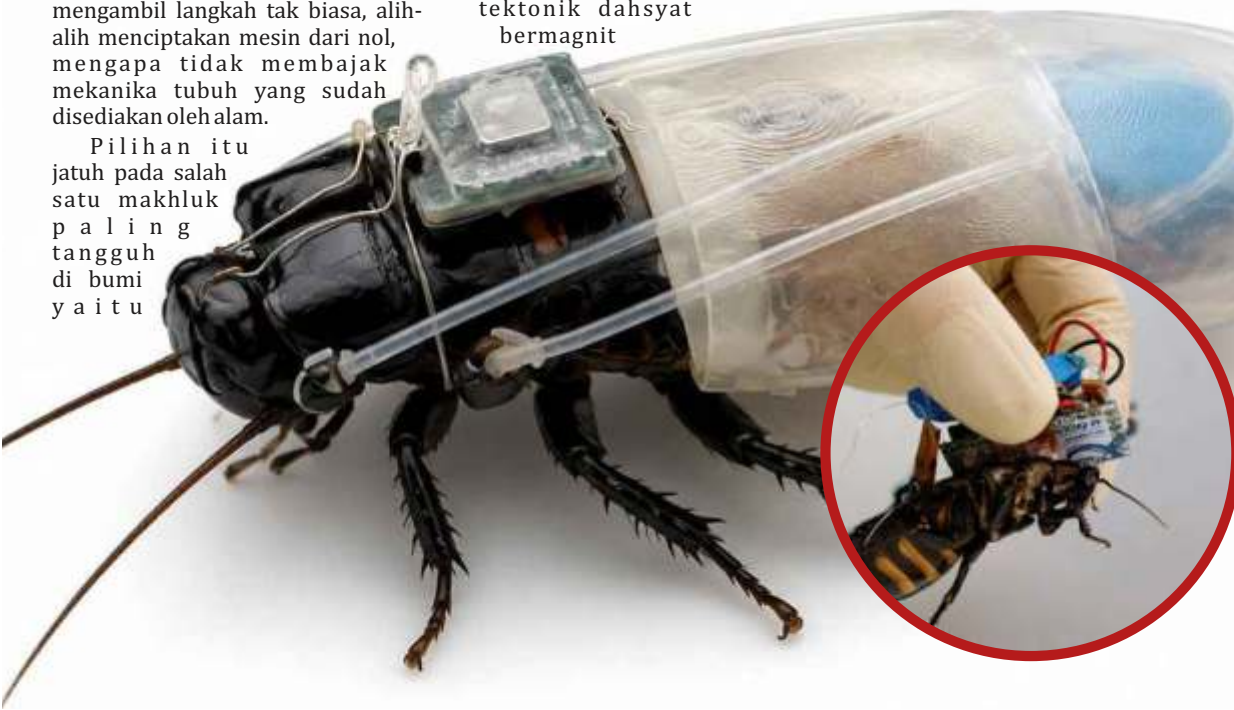
Terobosan Baju Selam 3 Jam

Mengatasi limitasi alamiah tersebut, sebuah studi mutakhir yang dipublikasikan pada 29 Juni 2026 di jurnal ilmiah bereputasi, Nature Communications, membawa kabar baik bagi dunia mitigasi bencana. Tim ilmuwan dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura dan Waseda University Jepang berhasil merancang sebuah "baju selam" khusus kedap air untuk kecoa cyborg.

Pakaian pelindung berteknologi tinggi ini mendorong kemampuan serangga hingga mampu bertahan hidup, bernapas, dan tetap bergerak lincah di dalam air hingga durasi tiga jam penuh.

Objek eksperimen ini adalah kecoa desis Madagaskar (*Gromphadorhina portentosa*) cyborg. Spesies ini dipilih karena ukurannya yang besar, sehingga memiliki kapasitas fisik yang ideal untuk menggondong ransel elektronik (backpack) pengetik sinyal saraf sekaligus mengenakan cangkang baju selam tanpa membebani pergerakannya.

Dalam rangkaian uji coba terkontrol, para peneliti memasukkan kecoa-kecoa bermantel khusus ini ke dalam akuarium, lalu mengarahkan mereka untuk merayap masuk ke dalam pipa-pipa plastik sempit. Lingkungan buatan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mensimulasikan kondisi pascabencana yang ekstrem: terendam air sepenuhnya, gelap, dan minim pasokan oksigen bebas. (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Cosmeticorexia: Saat Bahan Aktif Dewasa Rusak Kulit Anak

Gelombang konten digital yang bergerak cepat di media sosial kini melahirkan fenomena baru yang mengkhawatirkan di kalangan generasi Alfa. Anak-anak di bawah usia 13 tahun, bahkan dalam beberapa kasus mencakup balita, kini secara aktif mengadopsi rutinitas perawatan kulit atau skincare yang dirancang untuk orang dewasa.

Menggunakan produk berbahan aktif keras mulai dari serum anti-penuaan hingga eksfoliator kimia, mereka terjebak dalam obsesi kecantikan prematur yang kini dikenal di dunia medis sebagai cosmeticorexia atau dermorexia. Fenomena ini bukan sekadar tren kosmetik biasa, melainkan hasil dari ekosistem digital yang haus akan keviralan.

Laporan investigatif berskala global yang dirilis oleh The Guardian memetakan skala masalah ini secara gamblang. Dari analisis terhadap 7.600 video TikTok yang berkaitan dengan perawatan kulit, ditemukan bahwa 400 di antaranya menampilkan anak-anak di bawah usia 13 tahun sebagai kreator konten utama. Lebih mencengangkan lagi, sekitar 90 konten di antaranya memperlihatkan balita dan bayi yang wajahnya diaplikasikan berbagai produk kosmetik oleh orang tua mereka demi kebutuhan visual media sosial.

Komparasi Konten dan Realitas di Lantai Ritel

Konten-konten ini dikemas dengan formula yang identik dengan video influencer dewasa: anak-anak berdiri di depan cermin, mengetuk-ngetukan botol produk ke kamera, dan mengoleskan cairan konsentrat ke kulit mereka.

Dampaknya langsung terasa pada lanskap ritel global. Jaringan toko kosmetik premium seperti Sephora di berbagai belahan dunia kini dilaporkan mulai dipadati oleh pelanggan anak-anak.

"Kami menyaksikan anak-anak ini menjelajahi lorong toko, mencari produk dengan kandungan retinol atau asam glikolat untuk mengatasi kerutan

atau menyamarkan pori-pori—permasalahan kulit yang secara biologis belum ada pada wajah mereka. Banyak dari mereka datang tanpa didampingi orang tua, atau didampingi namun orang tuanya abai terhadap jenis bahan kimia yang dibeli oleh sang anak," dilansir The Guardian.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh sebuah studi komprehensif yang dipublikasikan oleh Dr. Molly Hayes beserta timnya dalam jurnal ilmiah Pediatrics. Melalui observasi ketat terhadap 100 video populer mengenai skincare anak di platform TikTok, tim peneliti menemukan bahwa mayoritas konten mengeksploitasi pemakaian produk anti-aging dan perawatan jerawat parah.

Ancaman Medis dan Kandungan Toksik

Secara dermatologis, kulit anak-anak memiliki tingkat reaktivitas dan permeabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan kulit orang dewasa. Pengguna an senyawa seperi

i retinol (turunan vitamin A) dan asam hidroksi (AHA/BHA) sebagai eksfoliator dapat dengan mudah memicu reaksi inflamasi akut, dermatitis kontak, hingga eksim menetap. Efek visualnya pun langsung terlihat; beberapa video yang beredar menunjukkan kulit anak yang memerah, melepuh kecil, dan mengelupas kasar akibat iritasi kimia.

Studi yang dipublikasikan oleh Michael S. Bloom dkk dalam jurnal Environmental Health Perspectives menemukan adanya korelasi signifikan antara penggunaan kosmetik harian pada anak dengan tingginya konsentrasi kadar ftalat (phthalates) dalam sampel urin mereka. Ftalat merupakan senyawa kimia yang kerap digunakan sebagai pelarut atau bahan pengawet dalam formula kosmetik serta material kemasan plastik.

Paparan ftalat dalam jangka panjang pada organisme yang sedang berkembang merupakan ancaman serius. Senyawa ini dikategorikan sebagai endocrine disruptor atau zat pengganggu sistem endokrin.

"Industri skincare telah lama membidik perempuan berusia 30-an dan 40-an dengan membangun anggapan bahwa penuaan adalah sesuatu yang harus dilawan, kemudian menjual berbagai produk sebagai solusi. Namun, terjadi pergeseran. Sekarang, anak perempuan kecil berada di bawah tekanan yang sama," kata Brooke Erin Duffy, Peneliti Media Sosial Cornell University dilansir BBC.

Industri kosmetik menangkap peluang dari kerentanan psikologis anak-anak pra-remaja (tweens) yang sedang berada dalam fase transisi pencarian identitas diri. Dengan memanfaatkan algoritma media sosial dan kemasan produk yang estetik dengan warna-warna pastel yang menarik, industri berhasil menanamkan rasa ketidakamanan (insecurity) pada anak perempuan di usia

yang sangat muda.

Kecemasan Penampilan

Di luar bahaya fisik yang nyata pada kulit dan organ dalam, beban psikologis yang ditanggung oleh anak-anak dalam pusaran cosmeticorexia tidak kalah mengkhawatirkan. Keharusan untuk tampil sempurna sesuai dengan standar artifisial yang diproduksi oleh filter dan pencahayaan digital memicu dismorfia tubuh minor. Anak-anak mulai memandang tekstur kulit alami mereka sebagai sebuah cacat estetika yang harus segera diperbaiki.

Kondisi ini memicu tingkat stres yang tidak semestinya dialami oleh kelompok usia sekolah. Kecemasan berlebih akan penampilan luar ini dilaporkan mulai memengaruhi fungsi sosial mereka, termasuk menurunnya kepercayaan diri untuk berinteraksi di sekolah tanpa lapisan produk kosmetik tertentu. Anak-anak terjebak dalam siklus perbandingan sosial konstan yang destruktif bagi kesehatan mental mereka. (farist/dya)



Dualisme Status Febrie...dari Hal 1

Penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, dikutip Rabu (15/6/2026). Ini setelah kejaksaan menerima pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Penerbitan sprindik baru tersebut membuat penyidik Kejaksaan Agung kembali memulai proses pembuktian. Dalam dokumen penyidikan yang baru, Febrie Adriansyah dan pihak swasta berinisial DR sementara dicantumkan sebagai saksi sambil menunggu kajian terhadap seluruh berkas perkara yang dilimpahkan Polri.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri menetapkan Febrie dan DR sebagai tersangka pada Sabtu (11/7/2026). Penetapan itu merupakan hasil rangkaian penyelidikan yang meliputi penggeledahan di belasan lokasi sejak 8 Juli 2026, pemeriksaan terhadap 15 saksi dan dua orang ahli, serta gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan penyidik menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi maupun TPPU terkait penanganan perkara PT Asabri dan perkara korupsi lainnya.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," ujar Totok.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang hadir dalam konferensi pers tersebut memastikan bahwa inisial FA merujuk kepada Febrie Adriansyah. Sementara itu, tersangka DR telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026, sedangkan Febrie belum menjalani penahanan.

Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan perubahan status dalam sprindik baru tidak menghapus penetapan tersangka yang dilakukan Polri. Menurut dia, Kejaksaan Agung perlu mempelajari terlebih dahulu seluruh alat bukti dan administrasi perkara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

"Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu terbit. Tidak gugur, yang

penting kita terima dulu, kita pelajari semua," kata Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (15/7/2026).

Anang membenarkan bahwa dalam dokumen penyidikan baru, Febrie dan DR masih dicantumkan sebagai saksi. Namun, status tersebut hanya bersifat administratif selama proses telaah terhadap berkas perkara yang diterima dari Polri berlangsung.

"Ya, di antaranya disebut oknum di salah satu perkara," ujarnya.

Ia menambahkan penyidik akan meneliti kembali seluruh berita acara pemeriksaan (BAP), alat bukti, serta dokumen lain yang diserahkan penyidik Polri. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan status hukum para pihak dalam penyidikan yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru sebagai dasar hukum untuk melanjutkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Kortastipidkor Polri. Ketiga perkara tersebut mencakup dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT Krakatau Steel, dugaan korupsi penanganan perkara PT Asabri, serta dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN.

Perkara pertama berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian utang PT CBS

kepada anak usaha PT Krakatau Steel, PT Krakatau Niaga Infrastruktur (KNI), pada periode 2020–2025.

Perkara kedua menyangkut dugaan korupsi dalam penanganan perkara PT Asabri pada periode yang sama. Sementara perkara ketiga terkait dugaan penyimpangan pengadaan batu bara untuk sejumlah PLTU milik PT PLN selama periode 2018–2026 yang melibatkan PT OBP dan PT BRA.

Penyidik menduga praktik tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara hingga sekitar Rp5 triliun. Dugaan penyimpangan juga disebut berdampak pada terganggunya pasokan listrik di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jabodetabek.

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo mengatakan penyidik menemukan sejumlah modus dalam perkara pengadaan batu bara tersebut.

"Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan di antaranya terkait adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok, manipulasi kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya," kata Robertus.

Menurut penyidik, manipulasi

tersebut diduga dilakukan melalui perubahan dokumen kualitas dan kuantitas batu bara yang dikirim kepada PLTU. Akibatnya, pembayaran kepada pemasok diduga tidak mencerminkan kondisi pasokan yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian negara.

Dengan diterbitkannya tiga sprindik baru tersebut, seluruh proses penyidikan kini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung. Penyidik akan mempelajari kembali seluruh alat bukti dan dokumen yang dilimpahkan Polri sebelum menetapkan langkah hukum lanjutan terhadap masing-masing perkara.

Guna memastikan penanganan perkara berjalan dengan kredibilitas tinggi, Kejaksaan Agung mengambil langkah taktis dengan membentuk tim penyidik khusus yang dinamakan Tim 9. Pembentukan tim khusus ini diumumkan secara resmi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Menurut Anang, komposisi personel di dalam tim ini sengaja dirancang khusus karena besarnya skala perkara yang ditangani. Ia memaparkan, "Di dalam sprindik baru yang kami terbitkan, makanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang sifatnya khusus kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari sembilan orang." (wid,rls,ant,tmo/dya)

Kuntadi Diusulkan Jadi Jampidsus, Punya Harta Rp3,67 M

KEPALA Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Kuntadi diusulkan menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah terseret perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Usulan tersebut diajukan Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme pergantian pejabat utama madya di lingkungan Korps Adhyaksa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya surat pengajuan nama calon Jampidsus baru tersebut.

"Secara resmi per kemarin hari Selasa (14/7/2026), Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti Pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri," kata Prasetyo, Rabu (15/7/2026).

Setelah usulan diterima, proses selanjutnya akan melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA). Presiden Prabowo akan menetapkan pengangkatan Jampidsus baru setelah seluruh tahapan selesai.

Kuntadi bukan sosok baru di lingkungan penegakan hukum Kejaksaan Agung. Sebelum menjabat Kepala BPA, ia pernah menduduki posisi Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan. Namanya juga dikenal sebagai jaksa yang menangani sejumlah perkara besar, termasuk kasus korupsi tata niaga timah yang menjerat pengusaha Harvey Moeis.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) pada 31 Maret 2026, Kuntadi

tercatat memiliki total kekayaan Rp3.677.081.787.

Aset terbesar berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp4,26 miliar. Kuntadi tercatat memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Bogor, dan Depok.

Selain itu, ia memiliki aset kendaraan senilai Rp99,5 juta berupa sepeda motor Piaggio Vespa S125 3V1E AT tahun 2016 dan mobil Ford Ecosport 1.5L tahun 2014.

Harta bergerak lainnya tercatat Rp162,34 juta, kas dan setara kas Rp366,7 juta, dengan utang Rp1,215 miliar.

Jumlah tersebut meningkat dibanding laporan sebelumnya pada 8 Maret 2025 saat Kuntadi masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Saat itu, total kekayaannya tercatat Rp3,42 miliar. (wid,ist,kum/dya)



Kabel Semrawut di Jakarta Mulai Ditata

Pekerja melakukan penataan kabel utilitas untuk merapikan jaringan kabel udara yang selama ini terlihat semrawut di sepanjang ruas Jalan Raya Jakarta-Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). (ist.antara)

UU HAJI DIGUGAT KE MK: UMRAH MANDIRI BISA BERUJUNG PIDANA

Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menilai aturan tersebut berpotensi mengkriminalisasi pelaku umrah mandiri yang mengoordinasikan perjalanan keluarga atau kerabat.

Permohonan uji materi yang teregistrasi dengan Nomor 239/PUU-XXIV/2026 itu diajukan oleh Febriansyah Ramadhan. Melalui kuasa hukumnya, Muhamad Syahnakri, pemohon mempersoalkan Pasal 115 dan Pasal 122 UU Haji karena dinilai menimbulkan tafsir bahwa seseorang yang mengajak, mengoordinasikan, hingga mendampingi rombongan umrah, meski tanpa tujuan komersial, dapat dianggap bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ilegal dan terancam sanksi pidana.

"Pemahaman demikian sangat merugikan Pemohon karena dalam setiap perjalanan umrah mandiri secara berkelompok, Pemohon sebagai ketua perjalanan pasti melakukan tindakan koordinatif, termasuk mengajak keluarga, mengumpulkan dokumen, mengurus visa, mengurus Siskopatuh, mengatur keberangkatan, dan mendampingi rombongan," kata Muhamad



Mahkamah Konstitusi (MK) mulai memeriksa permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri (UU Polri) yang mempersoalkan proses pembentukannya.(ANTARA)

Syahnakri saat sidang pemeriksaan perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7).

Menurut pemohon, persoalan tersebut muncul karena pelaksanaan umrah mandiri tetap tidak dapat dilepaskan dari sistem administrasi resmi yang terhubung dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Visa umrah dan pencatatan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) tetap harus diproses melalui atau setidaknya terhubung dengan PPIU berizin. Akibatnya, perjalanan yang diatur secara mandiri dapat terlihat secara administratif seolah-olah diberangkatkan oleh penyelenggara resmi.

Syahnakri menegaskan kliennya bukan pemilik maupun pengelola PPIU. "Pemohon tidak menjalankan

kegiatan usaha perjalanan umrah, tidak menawarkan paket perjalanan kepada publik, tidak memasarkan jasa perjalanan, tidak menghimpun dana jemaah untuk tujuan komersial, tidak mengambil keuntungan, dan tidak menempatkan diri sebagai badan usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah," ujarnya.

Dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 115 UU Haji yang melarang setiap orang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah, serta Pasal 122 yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda kategori VI, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut

Detil UU Haji Digugat ke MK

- **UU yang digugat:**
UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- **Pemohon:**
Febriansyah Ramadhan.
- **Objek gugatan:**
Pasal 115 dan Pasal 122 UU Haji.
- **Alasan gugatan:**
Berpotensi menjerat pelaku umrah mandiri yang mengoordinasikan perjalanan keluarga atau kerabat.
- **Ancaman pidana yang dipersoalkan:**
Penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda kategori VI bagi pihak yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU.
- **Dalil pemohon:**
Mengajak, mengurus dokumen, visa, Siskopatuh, hingga mendampingi rombongan keluarga bukanlah kegiatan usaha penyelenggaraan umrah.
- **Fakta administrasi:**
Visa umrah dan pencatatan Siskopatuh tetap harus melalui atau terhubung dengan PPIU berizin.
- **Permintaan ke MK:**
Menyatakan Pasal 115 dan Pasal 122 bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku umrah mandiri.

pemohon, kedua pasal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjerat masyarakat yang menjalankan umrah mandiri tanpa motif komersial.(wid,ist/dya)